

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Warga Kebanjiran Akibat Tiang LRT

Gambir, Warta Kota

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) protes kepada PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta. Keluhan disampaikan saat warganya di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Jakarta Timur mengalami banjir akibat konstruksi LRT Jakarta.

"Masalah yang timbul di situ, kebetulan itu Dapil saya, ada keluhan warga ketika sebelum Velodrome (Pulogadung) ada stasiun LRT itu, daerah situ nggak banjir katanya, tapi sesudah ada stasiun, katanya ada banjir," kata MTZ saat rapat kerja dengan LRT Jakarta di Komisi B pada Rabu (7/6/2023).

MTZ menuding, tiang-tiang stasun LRT Velodrome menjadi biang keladi terjadinya banjir. Pria dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini telah mengadvokasi keluhan warga ke Camat, Lurah hingga perseroan daerah untuk mencari jalan keluarnya.

"Nanti cuma dilihat persisnya seperti apa, mungkin ada kajian dari LRT. Tapi LRT memang perlu membuka diri untuk hal-hal yang berkaitan dengan dampak lingkungan sekitar," ujar MTZ.

Kaji Pembangunan Fase IB

Sementara itu Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT LRT Jakarta untuk mengkaji secara komprehensif pembangunan LRT Fase IB rute Velodrome-Manggarai. Pengawas pemerintah daerah itu mengkhawatirkan, pembangunan kereta ringan tersebut menambah kepadatan baru.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail

menyampaikan, saat ini keberadaan Stasiun Manggarai sudah banyak menampung banyak moda transportasi. Mulai dari Commuter Line Jabodetabek, kereta bandara, kereta jarak jauh, bus Transjakarta hingga bus feeder.

"Jangan sampai kita kurang komprehensif. Jadi, dari berbagai aspeknya itu harus komprehensif. Saya agak khawatir dari sekarang itu lahan yang sangat sempit," kata Ismail saat rapat kerja dengan LRT Jakarta pada Rabu (7/6/2023).

Ismail berpesan agar PT LRT Jakarta melakukan kajian dengan segera. Pria dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini contohkan bagaimana tertatih-tatihnya Stasiun Tanah Abang ketika menyandang status Transit Oriented Development (TOD).

"Penumpukan penumpang terjadi setiap dan baru dilakukan perluasan area oleh PT KAL. Jangan sampai kemudian lambat berpikirnya karena begitu ini (LRT Fase IB) terwujud itu kita bisa bayangkan high peak (puncak kesibukan), seperti apa sementara kebutuhan supporting sistemnya di area sekitar TOD-nya belum dipersiapkan," ungkapnya.

Komisi B DPRD DKI Jakarta juga meminta PT LRT melakukan peninjauan skema pembayaran di luar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui suntikan penyertaan modal daerah (PMD). Dikhawatirkan dengan proyeksi kebutuhan anggaran pembangunan hingga lebih dari Rp 5 triliun akan membebani APBD DKI Jakarta.

"Apakah ada credit financing sebagai sebuah alternatif untuk opsi B-nya ketika (pembayaran bersumber dari APBD seluruhnya) ini tidak

bisa terwujud," ujar Ismail.

Sementara itu, Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra mengungkapkan, proyek jalur LRT fase IB akan berjalan selama 22 bulan. Kegiatan-kegiatan pra konstruksi telah dimulai sejak awal tahun ini, misalnya dengan melakukan pemilihan konsultan proyek.

Terkait skema pembiayaan non APBD, dia mengatakan belum ada skenario pembiayaan proyek di luar dari APBD DKI. "Memang project LRT Fase IB yang sejauh ini memang skema (pembiayaan) nya melalui PMD yang telah disetujui oleh Pemprov DKI," katanya.

"Kalau untuk skema lain masih belum dipikirkan karena butuh waktu cukup lama. Target kami dalam dua tahun ini projectnya bisa berjalan dengan baik," sambungnya. (faf)